

IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (SIMOEV) DALAM PENGUKURAN CAPAIAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

Implementation of the Monitoring and Evaluation System (Simonev) in measuring the achievements of development planning programs at the Lampung Province Development Planning Agency

¹ Octa Vallen Dwi Puspita, ² Nana Mulyana, ³ Apandi

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
1octavallendwipuspita908@gmail.com, 2nana.mulyana@fisip.unila.ac.id, 3apandi@fisip.unila.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history :

Dikirim :

06-05-2024

Revisi Pertama :

30-06-2024

Diterima :

30-06-2024

Kata Kunci :

Sistem Monitoring dan Evaluasi; Perencanaan Pembangunan; Kebijakan

Keywords :

Monitoring and Evaluation System; Development Planning; Policy

Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Simonev) merupakan salah satu kebijakan yang menjadi bagian dari sistem e-government. Untuk itu dalam memonitor dan mengevaluasi perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hasil pengamatan pra-riset menunjukkan indikator program belum bersifat *outcome*. Selain itu, belum adanya satu data perencanaan juga menjadi permasalahan yang terjadi. Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) dalam mengukur capaian program perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan menggunakan teori Richard E. Matland, yang terdiri dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan serta faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan implementasi Simonev dengan teori dimaksud belum optimal ditinjau dari teori Richard E. Matland (1995). Pengukuran capaian program pada Simonev menjelaskan bahwa tidak terukurnya capaian program yang didasarkan dari belum sinkronnya program Pembangunan dan capaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan terhadap dokumen evaluasi.

Abstract

The Monitoring and Evaluation System of Development Planning (Simonev) is one of the policies that is part of the e-government system. Therefore, in monitoring and evaluating, it is necessary to be done, one of which is by

implementing information technology in the process of monitoring and evaluating the performance of local governments. The results of pre-research observations indicate that program indicators are not yet outcome-oriented. In addition, the lack of unified planning data is also a problem that occurs. This study examines the implementation of the Monitoring and Evaluation System (Simonev) in measuring the achievement of development planning programs at the Regional Development Planning Agency of Lampung Province using Richard E. Matland's theory, which consists of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy, as well as inhibiting factors. Based on the research results using descriptive qualitative methods with data collection techniques, interviews, observations, and documentation, the implementation of Simonev with the theory in question is not optimal based on Richard E. Matland's theory (1995). The measurement of program achievements in Simonev explains that the achievement of programs based on the lack of synchronization between Development programs and performance indicator achievements in planning documents towards evaluation documents.

A. PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerah, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Aturan tersebut merujuk pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara bertahap.

Kerangka penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan agar pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan wilayah sebagai bagian dari sistem nasional. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di setiap daerah haruslah sistematis, terencana, dan terpadu, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan sumber daya keuangan daerah.

Beranjak dari kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini mengarah pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Salah satu kebijakan yang muncul sebagai bagian dari sistem e-government adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Simonev). Simonev, yang mulai diterapkan sejak tahun 2019, menginovasi proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan Simonev, pengumpulan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih sistematis, memudahkan pekerjaan, dan mendukung program pemerintah, terutama SPBE.

Penerapan Simonev menciptakan pemantauan yang lebih efektif terhadap kemajuan program pembangunan dan memungkinkan identifikasi masalah yang muncul. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian data program pembangunan dengan indikator kinerja. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dan peningkatan penggunaan Simonev.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran krusial dalam mengelola pembangunan. Namun, tanpa sistem yang tepat, sulit bagi Bappeda untuk menilai secara akurat pencapaian program pembangunan. Simonev menjadi subjek penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan ini.

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang keberhasilan dan tantangan dalam menerapkan Simonev sebagai alat pemantauan dan evaluasi pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemantauan dan evaluasi di masa depan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Richard E Matland (1995), terdapat empat hal yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yang menjadi landasan dalam analisis dan untuk mengetahui faktor penghambat :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan berisi tentang muatan kebijakan yang dapat memecahkan permasalahan yang ada, seperti sejauh mana kebijakan yang telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak di pecahkan, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksana

Memuat mengenai pola kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait. Sebagai implementor kebijakan, tidak hanya pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan yakni pemerintah bekerjasama antar pemerintah, Masyarakat atau swasta, atau implementasi yang diswastakan. Dalam indikator kedua ini, penulis memfokuskan kepada pelaksanaan Simonev di Bappeda Provinsi Lampung.

3. Ketepatan Target

Indikator ini berhubungan dengan dengan tiga sub indikator, yakni : apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah target siap untuk diintervensi, dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Dalam indikator ketepatan lingkungan memuat isi dalam suatu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan persepsi publik mengenai kebijakan yang hendak diterapkan. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antar lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait.

B. METODE

Penelitian ini mengutamakan penggunaan data kualitatif, yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Karena penelitian kualitatif membutuhkan data sebagai sumber utama untuk menyusun hasil penelitian, teknik pengumpulan data menjadi sangat penting. Peneliti menggunakan beberapa instrumen seperti pertanyaan wawancara, lembar observasi, dan dokumen untuk memperoleh data.

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan interaksi antara peneliti dan narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi, keterangan, atau pendapat mengenai suatu permasalahan. Peneliti memilih menggunakan metode wawancara terstruktur. Dalam metode ini, peneliti telah menyiapkan pertanyaan tertulis sebelumnya berdasarkan informasi yang telah diketahui, untuk diberikan kepada informan. Pelaksanaan wawancara terstruktur melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi dalam implementasi Simonev di

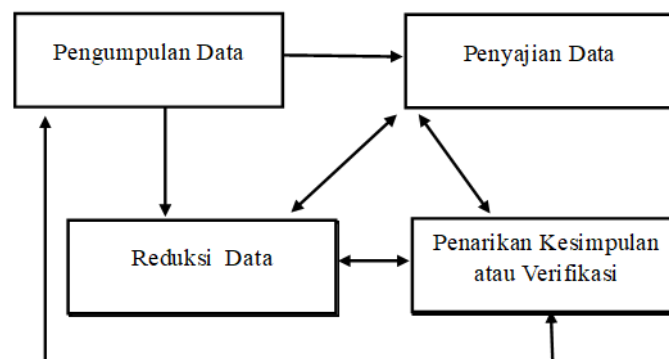
Bappeda Provinsi Lampung dan OPD pelaksana. Alat yang disiapkan peneliti dalam pelaksanaan wawancara adalah buku catatan kecil dan tape recorder.

Selain wawancara, observasi juga digunakan dalam penelitian ini. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan informasi dari Bappeda Provinsi Lampung dan melakukan wawancara untuk memperoleh data pendukung. Proses observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Simonev dalam pengukuran capaian program perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, dokumentasi juga menjadi teknik pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, catatan transkrip, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Dokumentasi membantu dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung untuk analisis penelitian.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang disusun agar dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan, untuk kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis matriks dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga arus aktivitas yang bersamaan: reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduction Data melibatkan proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi. Display Data merupakan kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan kesimpulan dan tindakan dapat diambil. Sedangkan, Conclusion Drawing and Verification adalah langkah terakhir dalam analisis data yang melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, berbagai aspek seperti kualitatif, keteraturan, pola, dan penjelasan dieksplorasi untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman
Sumber : Sugiyono, 2017

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) pada pengukuran capaian program perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga saat ini, dengan keberjalanannya yang lancar namun juga menghadapi kendala, yang dianalisis dengan menggunakan teori Richard E. Matland (1995). Menurut Matland, ketepatan implementasi diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang

diharapkan, baik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan maupun dalam proses yang digunakan untuk mencapainya. Tujuan tersebut dapat berupa solusi terhadap masalah tertentu, perubahan perilaku masyarakat, atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan agenda pemerintah. Matland juga menetapkan "empat tepat" yang harus dipenuhi dalam pengukuran keefektifan implementasi kebijakan.

1. Ketepatan Kebijakan

Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) pada pengukuran capaian program perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sudah dimulai sejak tahun 2019, meskipun hasilnya belum optimal dan masih mengalami beberapa kendala, yang dianalisis dengan teori Richard E. Matland (1995). Matland menekankan pentingnya ketepatan implementasi kebijakan, yang mencakup seberapa baik kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan dan sejauh mana kebijakan dibuat sesuai dengan karakter masalah yang ingin diselesaikan. Dalam hal ini, implementasi Simonev bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dan menyediakan layanan berkualitas tinggi, namun masih belum sepenuhnya mencapai kriteria SMART-C yang menegaskan pentingnya indikator program bersifat *outcome* atau dampak dari program tersebut.

Penerapan Simonev melibatkan pelaksana kebijakan seperti Bappeda Provinsi Lampung, vendor Simonev, dan beberapa OPD, yang secara umum telah menunjukkan upaya yang baik dalam meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara program pembangunan dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan dokumen evaluasi, serta kurangnya satu data perencanaan yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pembangunan.

Ketidakkampuan dalam melakukan pengukuran capaian program perencanaan pembangunan yang efektif, kurangnya satu data perencanaan yang tersedia, dan kendala teknis seperti aplikasi yang down atau tidak dapat diakses, merupakan beberapa faktor penghambat dalam implementasi Simonev. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, seperti menetapkan indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur, memprioritaskan konsistensi dalam regulasi yang mengatur Simonev, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk meningkatkan efektivitas sistem. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakatnya.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi fokus penting dalam implementasi kebijakan, seperti dalam kasus Simonev. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi ada tiga lembaga yang berpotensi menjadi pelaksana, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, ketepatan pelaksanaan, yang merupakan konsep yang menilai sejauh mana implementasi sesuai dengan desain awal, menjadi krusial. Fokus utamanya adalah untuk memahami sejauh mana kebijakan atau program dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menjamin bahwa proses implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan.

Simonev sebagai kebijakan monitoring dan evaluasi menggambarkan bagaimana implementor berkolaborasi dalam penerapannya. Misalnya, melibatkan Bappeda Provinsi Lampung dan CV. Siger Inovasi, yang menunjukkan kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan sistem tersebut. Dalam hal ini, Simonev berfungsi sebagai alat untuk memproyeksikan, mengolah, dan menyimpan data capaian pembangunan, dengan berbagai pihak seperti super admin, operator

Bappeda Provinsi Lampung, dan operator di 48 OPD Provinsi Lampung yang memiliki akses ke sistem tersebut.

Ketepatan pelaksanaan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi Simonev. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak pelaksana menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan fokus pada analisis ketepatan pelaksanaan, pemerintah dapat memastikan bahwa Simonev memberikan dampak yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa proses implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target (*target accuracy*) menjadi kunci penting dalam mengevaluasi kinerja suatu kebijakan atau program pemerintah. Ini mengacu pada sejauh mana kebijakan atau program berhasil mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dengan efektif. Dalam konteks Simonev, ketepatan target berkaitan dengan tiga sub indikator, yaitu kesesuaian target yang hendak diintervensi, kesiapan target yang diintervensi, dan apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan baru. Bappeda Provinsi Lampung dan beberapa OPD telah menunjukkan kesuksesan dalam memenuhi indikator pertama dengan optimalnya pengadaan SDM, serta kesiapan target pelaksana yang baik, yang menunjukkan komitmen dari seluruh OPD pelaksana dalam mengimplementasikan Simonev. Selain itu, Simonev juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang baru dan tidak tumpang tindih dengan sistem atau aplikasi lain yang dimiliki pemerintah daerah atau pusat.

Dalam menetapkan sasaran atau target, penting untuk memastikan bahwa target tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu, dan berkelanjutan (SMART-C). Sasaran yang jelas membantu memberikan arah dan fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan atau program. Selain itu, melakukan pengukuran secara teratur terhadap pencapaian target merupakan hal yang penting, melibatkan penggunaan indikator atau metrik yang sesuai untuk menilai sejauh mana target telah tercapai. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga penting untuk memastikan bahwa pencapaian target dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui penyampaian informasi yang jelas dan transparan serta pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan yang relevan. Kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai dampak yang diinginkan. Dengan memastikan ketepatan target, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan atau program yang diterapkan dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif, sehingga menciptakan dampak yang diinginkan bagi masyarakat.

4. Ketepatan Lingkungan

Konsep ketepatan lingkungan dalam administrasi negara mengacu pada sejauh mana kebijakan, program, atau tindakan pemerintah memperhitungkan dampaknya yang melibatkan pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan. Lingkungan kebijakan mencakup interaksi antara instansi perumus kebijakan seperti Bappeda Provinsi Lampung dan pihak swasta sebagai super admin dalam pelaksanaan kebijakan, seperti yang terlihat dalam Implementasi Simonev. Dalam penelitian ini, indikator ketepatan lingkungan yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, seperti interaksi antara Bappeda Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Daerah, CV. Siger Inovasi, dan 48 OPD, terbilang optimal. Simonev berfungsi sebagai sistem untuk memproyeksikan, mengolah, dan menyimpan data hasil capaian rencana pembangunan daerah, dan peran Bappeda Provinsi Lampung sebagai leading sector dalam implementasi Simonev telah menunjukkan upaya proaktif dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan seringkali dihambat oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar pemerintahan serta kompleksitas lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kasus implementasi Simonev, faktor penghambatnya dapat dianalisis menggunakan Teori Richard E. Matland (1995) terkait ketepatan pelaksanaan, seperti ketidakmampuan pengukuran capaian program yang efektif. Salah satu hambatannya adalah kurangnya regulasi yang merinci pengukuran capaian dan penggunaan indikator kinerja, serta ketidakpastian dalam regulasi yang dapat menyulitkan pelaksana dalam menafsirkan aturan. Selain itu, keragaman indikator, kompleksitas program, kualitas data yang buruk, tantangan dalam menetapkan target yang realistis, dan kesulitan dalam mengukur *output* dan *outcome* juga menjadi faktor penghambat. Tidak tersedianya database satu data perencanaan juga menjadi kendala, terutama karena data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Kendala teknis seperti ketidakterisian data dari seluruh OPD dan pembaruan atau upgrade Simonev yang memerlukan penyesuaian juga turut menghambat proses implementasi. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) dalam pengukuran capaian program perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung belum optimal menurut teori Richard E Matland (1995). Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara program Pembangunan dan capaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan dokumen evaluasi, yang menyebabkan capaian program tidak terukur dengan baik. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mensyaratkan bahwa indikator program harus mencerminkan hasil atau dampak yang diinginkan dari program tersebut. Masalah lainnya adalah kurangnya satu data perencanaan yang menyulitkan proses evaluasi.

Dalam implementasinya, pelaksana kebijakan seperti Bappeda Provinsi Lampung, vendor Simonev, dan beberapa OPD telah berkolaborasi dengan cukup baik untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian, evaluasi peneliti menunjukkan bahwa Simonev sebagai alat untuk memproyeksikan, mengolah, dan menyimpan data hasil capaian rencana pembangunan daerah Provinsi Lampung telah mencapai target pelaksanaannya dengan tepat, melibatkan 48 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bappeda Provinsi Lampung, sebagai leading sector dalam implementasi Simonev, telah berupaya untuk memastikan kesesuaian target dengan kebijakan yang telah diimplementasikan. Selain itu, tidak ditemukan kebijakan yang tumpang tindih dengan Simonev, sehingga seluruh aplikasi dan sistem yang digunakan telah sesuai dengan target-target yang diintervensi dan tujuan yang ingin dicapai.

Namun, ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi Simonev. Salah satunya adalah ketidakmampuan dalam melakukan pengukuran capaian program perencanaan pembangunan secara efektif. Selain itu, tidak adanya satu database perencanaan dan kendala teknis seperti ketidakterisian data dari OPD, aplikasi yang mengalami gangguan, dan upgrade aplikasi yang tidak sesuai dengan API (*application programming interface*) juga menjadi masalah yang perlu diatasi.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) dalam pengukuran capaian program perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, penting untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Libatkan para pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pengukuran kinerja untuk memastikan validitas dan relevansi dari indikator yang digunakan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan desk penyusunan program pembangunan dan capaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan agar sesuai dengan dokumen evaluasi.

Kedua, prioritas utama harus diberikan pada konsistensi dalam perumusan dan implementasi regulasi yang mengatur Simonev. Bappeda Provinsi Lampung perlu meninjau kembali aturan terkait pengukuran capaian program perencanaan dan membangun mekanisme umpan balik untuk perbaikan kontinu dalam proses pengukuran capaian program. Selain itu, pedoman yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan Simonev perlu disediakan, termasuk prosedur, metode, dan tanggung jawab yang terkait. Koordinasi antarlembaga pemerintah yang terlibat dalam implementasi Simonev juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan antar regulasi yang ada dan memberikan pelatihan serta dukungan yang diperlukan kepada pelaku di lapangan.

Ketiga, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus perlu dilakukan terhadap implementasi Simonev. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan guna meningkatkan efektivitas sistem. Pengembangan Simonev sebagai alat pengumpulan data yang terstruktur dan berkualitas juga penting dilakukan. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap metodologi yang digunakan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan juga diperlukan. Misalnya, pengembangan server Simonev yang berkaitan dengan peningkatan kualitas server, revisi sistem perhitungan fitur baru, serta melakukan sosialisasi dan evaluasi kepuasan pengguna aplikasi pada fitur baru Simonev.

REFERENSI/ REFERENCE

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Arikunto, S. (2016). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2013)., *Research methods in education*, Routledge.
- Creswell, John W. (2012). *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, D. S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implimentasi dan Evaluasi* . Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru .
- Hasbullah H. *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.
- Indrayani, E. (2020). *E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia* . Sumatera Barat: LPP Balai Insan Cendikia .

- Johnson, Robert Burke and Larry B. Christensen. (2007). *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. London: Sage Publications.
- Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik* . Banten : CV.AA Rizky
- Meutia , I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* . Bandar Lampung : Penerbit Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mutasar, Hasdyna, N., & Arafat, A. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Monitoring Kendaraan Dinas Terintegrasi Pada Bank Indonesia Lhokseumawe*.
- Nawawil. *Public policy: analisis, strategi advokasi teori dan praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara; 2009.
- Nugroho R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, A. C., & Guntur , M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik* . Gunungsari: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- Patton, Michael Quinn. (2009)penda. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 41.
- Saptutyingsih, E., & Setyaningrum, E. (2019). *Penelitian kuantitatif : metode dan alat analisis : dilengkapi dengan contoh proposal penelitian (1st ed.)*. Gosyen Publishing. (p. 103)
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). *Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya* .
- Suadi , & Nirmala , I. (2022). *Kebijakan Publik* . Bandung : Penerbit Widina .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* . Yogyakarta : Graha Ilmu .
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta caps.